

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2017, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenadamedia, Jakarta
- Budiono, Herlien, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2019, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O. S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Kie, Tan Thong, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Penerbit Karya Media, Sleman
- Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenadamedia, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah Edisi Pertama*, Prenadamedia, Jakarta

Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Subekti R, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Pembuktian*, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok

## **B. Jurnal dan Penelitian**

Gaol, Selamat Lumban, “Kedudukan Dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, Nomor 1, September, 2019

Junaedi dan Gunawan Djajaputra, “Tanggung Jawab PPAT Sementara Dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan”, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Maret, 2022

Romolo, Levin, 2013, *Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR 106/PDT/2017/PT YYK)*, Program Studi Magister Kenotariatan-Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

Sunanda, Budi, Amiruddin A. Wahab, Muzakkir Abubakar, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 11/Pdt.G/2008/PN-BIR,

tanggal 23 Februari 2009)”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, Nomor 1, Agustus, 2013

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893

#### **D. Putusan dan Penetapan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 415/Pdt.G/2017/ PN.Sby.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 284/PDT/2018/PT SBY

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1956 K/Pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 PK/Pdt/2021

#### **E. Website**

Boris Tampubolon, Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Sebagai Alat Bukti, <https://konsultanhukum.web.id/kekuatan-hukum-surat-pernyataan-sebagai-alat-bukti/>, diakses pada tanggal 23 November 2022

Gloria Beatrix, Perbedaan Akta Otentik dan Akta di bawah Tangan, <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022

Hukumonline, Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022